

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	0
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

# Delapan Lahan Tercatat Sebagai Aset

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketiga kalinya dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Senin (22/6). Upaya dalam meraih pencapaian itu salah satunya dengan pencatatan aset barang dari masing-masing wilayah pada tahun 2019 dimana khusus Jakarta Utara tercatat ada delapan aset.

Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah (PAD) Jakarta Utara, Ratna Diah Kurniati, mengatakan, beragam upaya dilakukan untuk mendukung raihan opini WTP Pemprov DKI Jakarta. "Dukungan ini salah satunya dengan pencatatan aset yang berkolaborasi dengan UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kota Jakarta Utara," kata Ratna, Senin (22/6).

Menurut Ratna, ada delapan aset berupa lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) milik Pemprov DKI Jakarta dicatat dan dilakukan pemagaran pada tahun 2019 silam. "Pencatatan kami tentunya melalui sistem daring yang bernama Sistem Informasi Elektronik Rekonsiliasi Aset

(SIERA)," kata Ratna.

Adapun kedelapan aset yang dicatat itu tersebar di tiga kecamatan Jakarta Utara yaitu Kecamatan Kelapa Gading, Tanjung Priok, dan Cilincing. Misalnya, di Jalan Kelapa Gading Hibrida VII RT 18/RW 15, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lalu di Jalan Bima 8 Blok B13 Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

"Jadi semua aset yang sudah terkonfirmasi, semua sudah ada di sana dan bisa diakses publik termasuk dari BPK RI," jelasnya. Ratna menambahkan pihaknya intens melakukan pendampingan terhadap UKPD karena menjadi kunci keberhasilan dalam pencatatan seluruh aset Pemprov DKI Jakarta yang selama ini belum tercatat.

"Jadi kalau ada aset yang belum tercatat, tim akan melakukan pendampingan.

Menggali lagi aset tersebut dengan berkolaborasi dengan UKPD terkait," ujarnya. Sementara, selain pencatatan dan pemagaran aset, sebanyak 19 sertifikat lahan pun telah diterbitkan. Sertifikasi ini menguatkan kepemilikan aset Pemprov DKI Jakarta agar lahan tidak diambil pihak lain. (jhs)



Warta Kota/Junianto Hamonangan